



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 70 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan transparan, guna mendeskripsikan arah dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik diperlukan adanya peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 68 Seri G1);

18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 42 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
16. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Penyelenggara SPBE adalah Tim Koordinasi SPBE yang dibentuk oleh Bupati guna untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dari Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
19. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.

BAB II  
PETA RENCANA SPBE

Pasal 2

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Daerah dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.
- (7) Bupati dapat mendelegasikan reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

## Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dokumen Peta Rencana SPBE Tahun 2020 – 2024.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 31 Desember 2021

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 70 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 70 Tahun 2021**  
**TANGGAL : 31 Desember 2021**



**PETA RENCANA**  
**SISTEM PEMERINTAHAN**  
**BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian





## PETA RENCANA SPBE TAHUN 2020 - 2024

Peta Rencana SPBE dirancang berdasarkan hasil kondisi eksisting dan tahapan pengembangan area SPBE. Rencana tiap tahun memiliki tujuan dan fokus pengembangan yang berbeda. Jumlah anggaran pelaksanaan SPBE Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun mencapai 13,519 miliar. Tahun 2022 adalah tahun yang memiliki anggaran SPBE terbesar yaitu 3,958 miliar.

Tabel 1. Peta Rencana SPBE Tahun 2020 – 2024

Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)	
2020	Proses Bisnis dan Urusan	Pemetaan Kondisi Eksisting	75	Bappeda	1.293	
	Data dan Informasi	Pengembangan Sistem Arsip Dokumen Digital *)	330	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		
	Sistem Aplikasi Jenis : Usulan Baru (UB), Pengembangan Eksisting (PE)	UB	Sistem Informasi Geografis Konflik Masyarakat	96		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Sistem Informasi Datawarehouse Kabupaten Probolinggo	96		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
			Dashbo ard Satu Data	96		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
			Dashbo ard Kesejahteraan Sosial	160		Dinas Sosial
	Infrastruktur Jaringan dan Keamanan		Pembelian Aplikasi ( <i>disesuaikan dengan kebutuhan</i> )	100		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
			Pembelian lisensi SSL untuk pengamanan akses ketika pengguna melakukan akses ke aplikasi SPBE.	100		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
			Pembelian Firewall untuk mengamankan aplikasi dari serangan peretas atau malware yang merusak sistem	150		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
	Tata Kelola dan Manajemen		Pembentukan Dewan TIK Kabupaten	5		* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo
			Penyusunan SOP pemanfaatan TI	5		* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo
			Penyusunan Kebijakan Keamanan informasi	5		* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo
			Penyusunan Kebijakan Co - Location di setiap OPD	5		* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo
			Penyusunan Kebijakan Manajemen TI	5		* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo
			Melakukan Sosialisasi PD Mandiri TI	10		* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo



**PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)	
		Pembinaan kewenangan dan tanggung-jawab manajemen TI	10	* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo		
	Penyelenggara SPBE	Peningkatan Kompetensi SDM TI meliputi: Service Desk; Manajemen Operasional TI; Technical Management; SDM TI dan TI	25	* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo		
		Penambahan SDM TI atau peningkatan kompetensi TI	10	* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo		
		Training dan Sertifikasi (Disesuaikan dengan kebutuhan tiap PD) <i>Selenggarakan di Bab Penyelenggara SPBE</i>	10	* Sekretariat Daerah * Bappeda * Dinkominfo		
<b>2021</b>	<b>Data dan Informasi</b>		Pengembangan Sarana dan metode backup informasi (Manajemen Data)	350	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	<b>1.903</b>
	<b>Sistem Aplikasi Jenis : Usaha Baru (UB), Pengembangan Eksisting (PE)</b>	<b>UB</b>	Sistem Informasi Bantuan Logistik Bencana	96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		<b>UB</b>	Dashboard Data Agregat Kependudukan	48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Geografis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Geografis Penyakit (Menular dan Tidak Menular)	96	Dinas Kesehatan	
		<b>UB</b>	Bridging SISDMK	48	Dinas Kesehatan	
		<b>UB</b>	Bridging RENBUT	48	Dinas Kesehatan	
		<b>UB</b>	Bridging E-Renggar	48	Dinas Kesehatan	
		<b>UB</b>	Bridging E-DBHC HT	48	Dinas Kesehatan	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Geografis Kesehatan Lingkungan	96	Dinas Kesehatan	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Monev Aplikasi dan Infrastruktur SPBE	160	Diskominfo	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Geografis Kawasan Perdesaan	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Kemasyarakatan	96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Geografis Potensi Usaha Ekonomi Kreatif	96	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		<b>UB</b>	Sistem Informasi Geografis Bengkel dan Derek Terdekat	48	Dinas Perhubungan	
		<b>PE</b>	Bridging INLISlite (Integrated Library System) V.2	48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>Infrastruktur Jaringan dan Keamanan</b>		Pengadaan server sebagai tempat untuk hosting dari aplikasi SPBE	65	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		
		Pengadaan server database sebagai tempat penyimpanan database dan aplikasi SPBE	65	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		
		Pengadaan router sebagai alat pendukung konektivitas jaringan	5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,		





Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
				dan Persandian	
		Pengadaan password door-lock sebagai pengamanan fisik ketika ingin masuk ke data center .Untuk server, perangkat konektivitas jaringan dan peralatan pendukung untuk mendukung keberlangsungan aplikasi	10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		Pengadaan UPS untuk menjaga aplikasi agar tetap aktif saat menunggugenset dapat beroperasi dengan sempurna	1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		Pengadaan genset sebagai pembangkit listrik pengganti ketika terjadi pemadaman listrik	5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		Pengadaan komputer untuk kegiatan operasional SPBE	150	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		Renovasi ruangan desa untuk melayani transaksi	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		Audit TIK	50	- Diskominfo - Inspektorat	
	Pembayaran programmer internal dari diskominfo dalam pengembangan software SPBE	10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian		
	<b>Tata Kelola dan Manajemen</b>	Pembagian wewenang dan tanggung-jawab manajemen resiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE	10	* Sekretariat Daerah * BKPSDM * BPPK AD *Diskominfo *Inspektorat	
	<b>Penyelenggara SPBE</b>	Training dan Sertifikasi (Disesuaikan dengan kebutuhan tiap PD) <i>Selengkapnya di Bab Penyelenggara</i> (kompetensi sumber daya manusia)	10	* Sekretariat Daerah * Badan Kepegawaian Daerah *Diskominfo	
<b>2022</b>	<b>Data dan Informasi</b>	Pemeliharaan Sistem Pendukung sistem back up (Manajemen Data)	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	3.958
<b>Sistem Aplikasi Jenis : Usulan Baru (UB), Pengembangan Eksisting (PE)</b>	<b>UB</b>	Sistem Informasi Manajemen Lembaga Masyarakat dan Politik	48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	<b>UB</b>	Sistem Informasi Manajemen Kebencanaan	160	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	<b>UB</b>	Sistem Informasi Pengurusan Dokumen Kependudukan	48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	<b>UB</b>	Sistem Informasi dan Manajemen Spasial Prasarana dan Sarana Pertanian	96	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	<b>UB</b>	Sistem Informasi Manajemen Pembinaan Koperasi dan UMKM	48	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
	<b>UB</b>	Sistem Informasi Manajemen Monev Koperasi	96	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	



**PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
		<b>UB</b> Aplikasi Penyusunan Laporan Kredit Modal Kerja (KMK)	48	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Pengelolaan Sampah	48	Dinas Lingkungan Hidup	
		<b>UB</b> Bridging Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3)	48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>UB</b> Bridging Pengolahan Data Sumber Daya Air (PDSPA)	48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Proyek	96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>UB</b> Bridging Geoportals Sistem Informasi Geografis Infrastruktur	48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>UB</b> Sistem Laporan Konstruksi (SILAKON)	48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Pengelolaan Peralatan	48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Keluarga Berencana	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Geografis Kampung KB	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Akseptor KB Terintegrasi	48	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	48	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Geografis Pariwisata	48	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Manajemen Permohonan Alat Olahraga	96	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata	96	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Geografis Seni dan Budaya	96	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Monev Standar Pelayanan Publik	96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (SIPPAUD)	96	Dinas Pendidikan	
		<b>UB</b> Sistem Informasi Manajemen Sarana Prasarana Sekolah	96	Dinas Pendidikan	





Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
		UB Sistem Informasi Monitoring Pembentukan Karakter Siswa	96	Dinas Pendidikan	
		UB Dashboard CCTV Lalu Lintas	96	Dinas Perhubungan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB)	48	Dinas Perhubungan	
		UB Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transportation Systems)	160	Dinas Perhubungan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Sarpras Perhubungan	48	Dinas Perhubungan	
		UB Aplikasi Pendataan Sarpras Perlengkapan Jalan	48	Dinas Perhubungan	
		UB Sistem Informasi Monitoring Industri dan Perdagangan	48	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PE Bridging INLISite (Integrated Library System) On The Road V.2	48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Kepustakaan	48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PE Sistem Pengelolaan Arsip Elektronik V.2	96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		UB Sistem Informasi Geografis Perumahan dan Kawasan Permukiman	48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
		UB Sistem Informasi Pertanahan	96	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
		UB E-SKTM (Elektronik Surat Keterangan Tidak Mampu)	96	Dinas Sosial	
		UB Bridging SIKS-NG	48	Dinas Sosial	
		UB Sistem Informasi Pendataan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar)	48	Dinas Sosial	
		UB Sistem Informasi Manajemen Bantuan Sosial	48	Dinas Sosial	
		UB Sistem Informasi Pelayanan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	96	Dinas Tenaga kerja	
		UB Sistem Komputerasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)	96	Dinas Tenaga kerja	
		UB Sistem Informasi Manajemen Penertiban Pelanggaran	48	Satuan Polisi Pamong Praja	
		UB Sistem Informasi Manajemen Tibumtra mas (Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat)	96	Satuan Polisi Pamong Praja	
		UB Sistem Informasi Manajemen Kebakaran	96	Satuan Polisi Pamong Praja	
		UB Sistem Informasi Manajemen Survei Kepuasan Masyarakat	96	Kecamatan	





Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
	Infrastruktur Jaringan dan Keamanan	Pembelian lisensi database dalam implementasi SPBE	75	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Pengembangan software infrastruktur dan keamanan SPBE yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo	50	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Maintenance terhadap aplikasi (seperti bug fixing, pengubahan, pengurangan, atau penambahan fitur dari aplikasi)	25	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Perawatan piranti fisik dari server, access point, ataupun router, serta kabel dan peralatan lainnya	25	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Pembelian piranti TK yang rusak atau perlu penambahan	5	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Pembayaran langganan bandwidth yang dibutuhkan oleh dinas	15	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Pembaharuan SSL, firewall, cPanel, dan aplikasi yang memiliki domain.go.id, serta lisensi IP address (Manajemen Keamanan informasi)	150	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
	<b>Tata Kelola dan Manajemen</b>	Sosialisasi SPBE 2022 Ke Seluruh OPD meliputi: manajemen resiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan serta Audit TIK	15	* Sekretariat Daerah * BKPSDM * BPPKAD * Diskominfo * inspektorat	
	<b>Penyelenggara SPBE</b>	Training dan Sertifikasi (Disesuaikan dengan kebutuhan tiap PD) Selengkapnya di Bab Penyelenggara SPBE (Kompetensi Sumber Daya Manusia)	10	* Sekretariat Daerah * Badan Kepegawaian Daerah * Diskominfo	
<b>2023</b>	<b>Data dan Informasi</b>	Pembangunan <i>datawarehouse</i> (manajemen data)	50	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	<b>3.321</b>
	<b>Sistem Aplikasi Jenis : Usulan Baru (UB), Pengembangan Eksisting (PE)</b>	UB Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Wawasan Kebangsaan	48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		UB Sistem Informasi Geospasial Daerah	48	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
		PE Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Gaji V.2	96	Badan Kepegawaian Daerah	
		PE Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) V.2	96	Badan Keuangan Daerah	



**PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
		PE Sistem Informasi Perjalanan Dinas V.2	96	Bagian Umum	
		UB e-Audit (Sistem Informasi Manajemen Daerah Continuous Auditing and Continuous Monitoring/ SIMDA CACM)	48	Inspektorat	
		UB Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIDP) Monitoring dan Evaluasi (Monev)	96	Bagian Organisasi	
		UB Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD)	96	Bagian Pemerintahan	
		UB Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	48	Dinas Kesehatan	
		UB e-Monev Obat (Sistem Monitoring dan Evaluasi Katalog Obat)	48	Dinas Kesehatan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pertanian	48	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		UB Sistem Informasi Manajemen Tanaman Pangan dan Holtikultura	96	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		UB Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	96	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan dan Simpan Pinjam	96	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		UB Service Desk Kabupaten Probolinggo	48	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		UB Dashboard CCTV Command Center	48	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
		UB Sistem Informasi Manajemen Aduan Permasalahan Lingkungan Hidup	48	Dinas Lingkungan Hidup	
		UB Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	96	Dinas Lingkungan Hidup	
		UB Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa)	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PE Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa) V.2	48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		UB Sistem Informasi Pemasaran Pariwisata (e-Tourism)	96	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan dan Kepramukaan	48	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		UB Sistem Informasi Pendataan Minat Bakat dan Prestasi Pemuda	96	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	
		PE E-Rekom V.2	96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	





Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
		UB Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal	96	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
		UB Sistem Informasi Manajemen PAUD/PNF	96	Dinas Pendidikan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	96	Dinas Perikanan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pembudidayaan Ikan	96	Dinas Perikanan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Jejaring Klaster	96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		UB Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi	48	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
		UB Sistem Informasi Manajemen Penerangan Jalan Umum	48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
		UB Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman	48	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		UB Sistem Informasi Ketenakerjaan (SISNAKER)	96	Dinas Tenaga kerja	
		UB Sistem Informasi Manajemen Bursa Kerja	96	Dinas Tenaga kerja	
		UB Sistem Informasi Pelayanan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	96	Dinas Tenaga kerja	
		UB Sistem Informasi Manajemen Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat)	96	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PE LAPAK (Layanan Cepat Administrasi Kecamatan) V.2	96	Kecamatan	
		UB Telemedicine Online	48	RSUD	
		UB Pendaftaran Antrian Rumah Sakit Online	96	RSUD	
	<b>Infrastruktur Jaringan dan Keamanan</b>	Pengembangan software infrastruktur dan keamanan SPBE yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo	50	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Maintenance terhadap aplikasi (seperti bug fixing, pengubahan, pengurangan, atau penambahan fitur dari aplikasi)	25	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Perawatan piranti fisik dari server, access point, ataupun router, serta kabel dan peralatan lainnya	25	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Pembelian piranti TK yang rusak atau perlu penambahan	5	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Pembayaran langganan bandwidth yang dibutuhkan oleh dinas	15	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	





**PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
		Pembaharuan lisensi SSL, firewall, cPanel, aplikasi yang memiliki domain.go.id, serta lisensi IP address (manajemen keamanan informasi)	150	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
	<b>Tata Kelola dan Manajemen</b>	Monitoring dan Evaluasi tata kelola dan manajemen SPBE yang terdiri atas : manajemen resiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan serta audit TIK	15	* Sekretariat Daerah * Bappeda * Diskominfo * BPPK AD * BKPSDM * Inspektorat	
	<b>Penyelenggara SPBE</b>	Training dan Sertifikasi (Disesuaikan dengan kebutuhan tiap PD) <i>Selengkapnya di Bab Penyelenggara SPBE (kompetensi sumber daya manusia)</i>	10	* Sekretariat Daerah * Bappeda *Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	
<b>2024</b>	<b>Data dan Informasi</b>	Pengembangan Sarana sistem recovery data secara otomatis (manajemen data)	125	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	<b>3.044</b>
	<b>Sistem Aplikasi Jenis : Usulan Baru (UB), Pengembangan Eksisting (PE)</b>	PE e-Kinerja V.2	96	Badan Kepegawaian Daerah	
		PE Sistem Informasi Manajemen Kepadangan dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) V.2	96	Badan Kepegawaian Daerah	
		PE Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) V.2	160	Badan Kepegawaian Daerah	
		UB Sistem Informasi Manajemen Rekrutmen CPNS dan PPPK	96	Badan Kepegawaian Daerah	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai	96	Badan Kepegawaian Daerah	
		UB Single Sign On (SSO) Kepegawaian	96	Badan Kepegawaian Daerah	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pencairan Dana APBD	96	Badan Keuangan Daerah	
		UB Sistem Informasi Manajemen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD)	48	Badan Keuangan Daerah	
		UB Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak	48	Badan Keuangan Daerah	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah	48	Badan Keuangan Daerah	
		UB Sistem Informasi Monev Perencanaan dan Penganggaran(e-MONEV)	96	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
		UB Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)	48	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
		UB Sistem Informasi Manajemen Litbang (e-Litbang)	96	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
		UB Aplikasi Rekomendasi Dokumen Kapal	96	Dinas Perikanan	
	UB Sistem Informasi Data Pelaku Usaha Perikanan Kelautan (SIMKUPK)	48	Dinas Perikanan		





Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
		PE E-Pasar V.2	96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Jejaring Klaster	96	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Usaha Peternakan	48	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia	96	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Veteriner	48	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Kesehatan Hewan	48	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Data Bidang Kesejahteraan Masyarakat (e-Kesra)	96	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	
		UB Sistem Informasi Geografis Tempat Ibadah	48	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	
		UB Sistem Informasi Manajemen Kerjasama Pemerintah Daerah	48	Bagian Pemerintahan	
		UB Sistem Informasi Manajemen BUMD	96	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	
		UB Sistem Informasi Manajemen Prediksi Harga Pasar	48	Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	
		PE Sistem Informasi Manajemen Produk Hukum V.2	160	Bagian Hukum	
		UB Sistem Informasi Manajemen Pemberitaan	96	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		UB Sistem Informasi Manajemen Keprotokolan	48	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		UB Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (SINJAB ABK)	48	Bagian Organisasi	
		UB Sistem Informasi Manajemen SOTK	48	Bagian Organisasi	
		PE E-Surat Mobile V.2	96	Bagian Umum	
		UB Sistem Informasi Manajemen Rapat	96	Sekretariat DPRD	
	Infrastruktur Jaringan dan Keamanan	Pengembangan software infrastruktur dan keamanan informasi SPBE yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo	50	* Diskominfo * PD terkait	
		Maintenance terhadap aplikasi (seperti bug fixing, perubahan, pengurangan, atau penambahan fitur dari aplikasi)	25	* Dinkominfo * PD terkait	
		Perawatan piranti fisik dari server, access point, ataupun router, serta kabel dan peralatan lainnya	25	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persediaan * PD terkait	
		Pembelian piranti TK yang rusak atau perlu penambahan	5	* Dinkominfo * PD terkait	



**PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
KABUPATEN PROBOLINGGO**



Tahun Perencanaan	Area Pengembangan	Jenis Kegiatan	Biaya (Dalam Juta)	OPD Penanggungjawab	Total / Tahun (Miliar)
		Pembayaran langganan bandwidth yang dibutuhkan oleh dinas	15	* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian * PD terkait	
		Pembaharuan lisensi SSL, firewall, cPanel, dan aplikasi yang memiliki domain.go.id, serta lisensi IP address	150	* Dinkominfo * PD terkait	
	<b>Tata Kelola dan Manajemen</b>	Monitoring Evaluasi 2024 yang terdiri dari : manajemen resiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE dan audit TIK	15	* Sekretariat Daerah * Bappeda * Diskominfo * BPPKAD * BKPSDM * Inspektorat	
	<b>Penyelenggara SPBE</b>	Training Sertifikasi (Disesuaikan dengan kebutuhan tiap PD) <i>Selengkapnya di Bab Penyelenggara SPBE</i> (kompetensi sumber daya manusia)	10	* Sekretariat Daerah * Bappeda * Diskominfo	
<b>Total</b>					<b>13.519</b>

\*) Menggunakan data dari RIPTI Probolinggo Tahun 2018 - 2028





Untuk penyelenggaraan SPBE di setiap tahunnya sebesar Rp 2.703.800.000. Berdasarkan anggaran yang direncanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan SPBE lebih banyak difokuskan ke dalam pengembangan aplikasi SPBE dimana nominal anggaran mencapai 10 miliar lebih. Kemudian diikuti dengan pengembangan infrastruktur jaringan dan keamanan yang mendukung pembuatan aplikasi.

Tabel 2. Rekapitulasi Anggaran Tahapan Pengembangan SPBE

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
Proses Bisnis Dan Urusan	75.000.000	-	-	-	-	<b>75.000.000</b>
Data dan Informasi	330.000.000	350.000.000	100.000.000	50.000.000	125.000.000	<b>955.000.000</b>
Infrastruktur Jaringan dan Keamanan	350.000.000	461.000.000	345.000.000	270.000.000	270.000.000	<b>1.696.000.000</b>
Sistem Aplikasi	448.000.000	1.072.000.000	3.488.000.000	2.976.000.000	2.624.000.000	<b>10.608.000.000</b>
Tata Kelola dan Manajemen	45.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	<b>100.000.000</b>
Penyelenggara SPBE	45.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	<b>85.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>1.293.000.000</b>	<b>1.903.000.000</b>	<b>3.958.000.000</b>	<b>3.321.000.000</b>	<b>3.044.000.000</b>	<b>13.519.000.000</b>

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

